

Peran Pemerintah Desa Dalam Memotivasi UMKM Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Ikhwani Ratna¹, Muklis², Ari Nur Wahidah³

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: ¹muklis@uin-suska.ac.id

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Memotivasi UMKM di Desa Salo Kecamatan Salo Kab. Kampar serta faktor-faktor penghambat pemerintah desa dalam menjalankan perannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu wawancara obseservasi dan dokumentasi. Peneliti menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 52 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan UMKM sebagai indikator penelitian. Dengan indikator penelitian Pemerintah Desa sebagai Fasilitator, Motivator dan Katalisator. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa peran pemerintah desa sebagai fasilitator belum terlaksana dengan baik. Dikarenakan peran tersebut sebagian tidak bersifat umum. Contohnya pelatihan/pendidikan yang diadakan itu hanya untuk yang menjahit saja. Sementara untuk UMKM yang di bidang lain itu belum ada. Pemerintah desa sebagai motivator juga dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik dikarenakan hanya pelaku UMKM yang menjahit dan Gabungan kelompok tani (Gapoktan) saja yang merasakan motivasi tersebut. Sementara peran pemerintah sebagai katalisator dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Modal, sumber daya manusia, masyarakat yang masih takut untuk mencoba dan malas mencari wawasan serta sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Motivasi, UMKM

***Abstract** – This study aims to find out how the Role of the Village Government in Motivating MSMEs in Salo Village, Salo District, Kab. Kampar and the inhibiting factors of the village government in carrying out its role. The research method used in this research is descriptive qualitative with a sociological juridical research approach. Data collection techniques used are observation interviews and documentation. The researcher used Kampar Regency Regional Regulation No. 52 of 2016 concerning MSME Empowerment as a research indicator. With research indicators of the Village Government as Facilitators, Motivators and Catalysts. Based on the research conducted, it was found that the role of the village government as a facilitator had not been carried out properly. Because the role is partly not general. For example, the training/education held is only for those who sew. Meanwhile, there are no MSMEs in other fields. The village government as a motivator can also be said to have not been implemented properly because only MSME actors who sew and the Association of Farmers Groups (Gapoktan) feel this motivation. Meanwhile, the government's role as a catalyst can be said to be running well. While the inhibiting factors are capital, human resources, people who are still afraid to try and are lazy to seek insight and facilities and infrastructure. An abstract is a brief summary of a paper to help readers quickly ascertain the purpose of the study and according to research needs. Abstracts must be clear and informative, provide a statement for the problem under study and the solution. The abstract length is between 90 and 230 words. Avoid unusual abbreviations and define all symbols used in abstracts. Using keywords related to research topics is recommended.*

Keywords: Role, Village Government, Motivation, MSMEs

1. PENDAHULUAN

Perekonomian merupakan suatu hal yang sulit untuk dilepaskan dari aktivitas manusia, seiring perubahan zaman, maka kebutuhan manusia akan terus mengalami pertumbuhan dan peningkatan dan kita terus tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan tersebut. Kedaulatan desa dalam mengatur sendiri urusan pemerintahan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat atas prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional memiliki batas-batas wilayah yang dimiliki dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bowono, 2019). Dengan adanya undang-undang mengenai desa ini telah membuka pikiran masyarakat dan menggerakkan masyarakat di desa agar lebih cepat tanggap dalam membangun desanya. Pemerintah desa selaku pemimpin di desa juga sebagai pengurus dalam

pembangunan di desa tentu mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perubahan di desanya. Desa Salo Kecamatan Salo Kab. Kampar termasuk kategori desa yang sedang berkembang. Dikatakan Desa berkembang, jika sebuah desa memiliki aktivitas ekonomi, sosial dan sumber daya lingkungan yang baik, namun belum mampu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan kualitas hidup yang layak dan mampu mengatasi kemiskinan (Raharjo, n.d.). Dalam perkembangan tersebut pemerintah desa juga harus berperan aktif, salah satu peran desa yaitu pengembangan ekonomi di desanya dengan cara memotivasi UMKM untuk mencapai standar hidup yang layak, dapat menghasilkan pekerjaan sendiri, membuka lapangan pekerjaan dan dapat mengurangi pengangguran. Dalam upaya mengembangkan ekonomi di desa sebenarnya sudah lama diterapkan pemerintah dengan bermacam strategi perencanaan. Akan tetapi kenyataannya belum dapat menghasilkan hasil yang maksimal atau memuaskan sesuai yang di kehendaki. Ada berbagai alasan menjadi penyebabnya, misalnya sulitnya dalam proses pemasaran, kurangnya permodalan, struktur organisasi dalam pembagian kerja yang tidak standar, kualitas manajemen yang buruk, sumber daya manusia yang terbatas, banyak orang tanpa laporan keuangan, aspek hukum yang lemah, kualitas teknis yang masih rendah (Kencana, Hilya, 2019). Maka dari itu diharapkan kepada pemerintah desa untuk mampu menumbuh dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan melalui UMKM. Pemerintah desa bertanggung jawab secara langsung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, mempertahankan standar hidup yang layak bagi masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas UMKM di daerahnya.

Menurut Partomo (2004) dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM mempunyai peran yang penting, dikarenakan sebagian besar penduduk di Indonesia masih berpendidikan rendah dan dalam kehidupan sehari-haripun mereka hidup di kegiatan usaha baik di sektor modern maupun tradisional, namun dalam pengelolaannya masih belum memiliki standar yang baik.

UU Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha lainnya yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Perusahaan kecil yang dimiliki dan dioperasikan oleh beberapa orang dengan jumlah aset dan pendapatan tertentu.

UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 8 dan 10 serta Perda Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 11 dan 13 juga menyatakan:

1. Pemberdayaan adalah upaya sinergis yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk perubahan iklim dan pengembangan usaha untuk memungkinkan UMKM tumbuh menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
2. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut pemerintah pusat maupun daerah mempunyai peran dan tanggung jawab langsung dalam memodali, memberikan jaminan, memberikan fasilitas, pengembangan dan peningkatan masyarakat sebagai pelaku UMKM.

Pemerintah daerah/desa berperan dalam UMKM salah satunya sebagai fasilitator, yaitu berperan mengembangkan usaha masyarakat serta memfasilitasinya, berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2008 berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah dan Pemerintah daerah memfasilitasi di bidang-bidang berikut:

- a. Pemasaran
- b. Sumber daya manusia dan
- c. Desain dan teknologi
- d. Produksi dan Pengolahan

Kemudian juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kampar Nomor 52 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 14 dan 15 tentang penjaminan dan pembiayaan untuk para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Dalam Peraturan Daerah tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah, dunia usaha

dan masyarakat melalui Bank, dan lembaga keuangan bukan Bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM dan juga memberikan jaminan pinjaman kepada UMKM oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan dalam memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.

Tabel 1. Jumlah UMKM Pada Tahun 2018-2021

No	Jenis Usaha	2018	2019	2020	2021
1	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	60	75	65	100

Sumber :Kasi Pemerintahan Desa Salo

Dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM dari tahun 2018-2021 mengalami kemajuan dan penurunan. Kemajuan dan penurunan tersebut bersifat dinamis dan berubah-ubah. Dapat dilihat dari pertumbuhan UMKM Tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan, walaupun angka kenaikan tidak banyak tetapi ini juga mempengaruhi kepada ekonomi penduduknya. Dan berikutnya di tahun 2020 mengalami penurunan pada jumlah UMKM yang sebelumnya 75menjadi 65 pelaku UMKM, yang mana sama-sama kita ketahui Indonesia juga termasuk negara yang terkena virus Covid-19. Tanpa disadari UMKM juga ikut merasakan dampaknya, banyak UMKM yang tutup atau gulung tikar pada masa pandemi ini. Kemudian pada tahun 2021 Pertumbuhan UMKM sudah berangsur pulih dan mengalami kemajuan dari jumlah sebelumnya. Para pelaku UMKM sudah mulai bangkit dari keterpurukan yang disebabkan Covid-19, banyak dari masyarakat yang membuka usaha sendiri dikarenakan pada saat itu tidak bisa kemana-mana dan dalam bekerja pun diterapkan Work from Home (Bekerja dari rumah). Banyak dari mereka yang mempunyai ide bagaimana caranya walaupun dirumah saja tetapi tetap memiliki penghasilan. Ditambah pada saat itu pemerintah juga memberikan program bantuan untuk para pelaku UMKM agar bisa mengembangkan kembali usahanya. Jadi jumlah pelaku UMKM dari tahun 2018-2021 adalah 100 UMKM. Peneliti juga sudah melakukan observasi dan wawancara dengan Kepala Desa Salo Kecamatan Salo Rabu, 28 Juni 2023. Dalam wawancara tersebut peneliti mendapatkan apa saja jenis UMKM yang ada di Desa Salo Kecamatan Salo tersebut. Diantaranya: dagang barang harian dan pedagang along-along, pangkas rambut, pedagang baju dan celana, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, usaha laundry, depot air minum, rumah makan, pedagang kue dan sarapan pagi, penjual ice cream, jasa pencucian kendaraan bermotor, bengkel dan sparepart kendaraan bermotor, penjahit pakaian, toko bangunan, konter pulsa, usaha bidang perkebunan, kelompok tani dan masih banyak lagi lainnya (Selamat, 2023).

Tabel 2. Jumlah UMKM berdasarkan Jenis dari Tahun 2018-2021

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Kuliner	20
2	Toko kelontong	20
3	Fashion	20
4	Jasa dan layanan	10
5	Agrobisnis	26
6	Lainnya	4
Total		100

Sumber : Data Olahan Peneliti

Tabel diatas menjelaskan jenis UMKM pada tahun 2018-2021 yang mana para pelaku UMKM ada yang sudah mempunyai usaha dari tahun 2018 kemudian bertahan hingga saat ini, ada juga para pelaku UMKM yang mempunyai usaha kemudian sudah tidak berusaha lagi serta ada juga

para palaku UMKM yang mempunyai usaha, kemudian tutup atau tidak berusaha kemudian mencoba membuka usaha kembali.

2. METODE

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pendekatan penelitian langsung oleh peneliti sendiri. Metode penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatannya adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian lapangan langsung oleh peneliti sendiri. Pendekatan sosiologis ini mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata (Ningsih, 2020). Pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh wawasan secara empiris dengan langsung pada objeknya. Sosiologis bersifat empiris artinya sosiologis didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak spekulatif (Tjipto, 2008).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Sayuti, 2012). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif berdasarkan pendekatan kualitatif yang menggambarkan keadaan benda, orang, lembaga, komunitas, dll dengan menggambarkan secara langsung fenomena yang terjadi di dalam objek penelitian.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif berdasarkan pendekatan kualitatif yang menggambarkan keadaan benda, orang, lembaga, komunitas, dll dengan menggambarkan secara langsung fenomena yang terjadi di dalam objek penelitian.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam format atau format file apa pun. Data ini harus dikumpulkan melalui informan atau responden, yaitu seseorang yang dijadikan subjek penelitian atau sebagai sarana untuk memperoleh informasi atau data. (Narimawati, 2008)

b. Data Sekunder

Data sekunder Sumber data yang tidak diberikan langsung kepada peneliti. Data ini bisa berupa dokumen, file, dan sebagainya. Data sekunder dimaksudkan untuk mendukung kebutuhan data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku referensi atau dokumen. Data lain berupa dokumen jurnal, artikel, dll (Sugiyono, 2008)

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Riset kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mengkaji buku referensi, laporan, jurnal, dan media pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
2. Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu dan dapat berupa teks atau gambar yang digunakan untuk mengabadikan data selama penelitian.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa.
5. Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soehartono teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data sebaik-baiknya dan diolah serta dianalisa sesuai dengan kerangka metode penelitian (Soehartono, 2008).

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang di mana informasi dan ide dipertukarkan melalui tanya jawab sehingga makna dapat dibangun tentang topik tertentu.

b. Observasi

Pengamatan adalah seni mengamati. Pengamatan dilakukan Langsung pada objek yang diteliti. Metode pengumpulan data observasional ini digunakan saat menyelidiki perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, dan apakah jumlah responden yang diamati terlalu banyak. Pengamatan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa menemukan data yang muncul pada subjek penelitian yang berupa peran pemerintah desa, yang berkaitan tentang apa yang dilakukannya untuk memotivasi UMKM seperti pemberian modal, pemberian fasilitas, pelaku UMKM, bagaimana UMKM di desa tersebut dan lainnya

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, bagan, foto dan laporan yang dapat mendukung penelitian. Umumnya berupa data statistik, agenda kegiatan, keputusan atau kebijakan produk, sejarah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Layanan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Masalah Desa

Masalah Desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa dengan menggunakan 3 (tiga) tools Partisipatory Rural Apraisal (PRA) yakni Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Diagram/bagan kelembagaan.

Permasalahan secara umum Desa Salo dijabarkan sebagai berikut :

a. Bidang Infrastruktur Desa/Sarana Prasarana

1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa.
2. Keberadaan Tiang dan Jaringan Listrik masih kekurangan
3. Kebutuhan akan Box Culvert belum terpenuhi
4. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
5. Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir
6. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan
7. Kemampuan kader desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai.

b. Bidang Pendidikan

1. Bangunan pelengkap (Infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (pagar sekolah, Sound system, MCK, Komputer dll).
2. Pustaka Desa belum ada
3. Pustaka PDTA dan MI belum ada
4. Taman Bermain Paud dan TK belum memadai
5. Bus Sekolah belum ada
6. Minat Baca Masyarakat kurang

7. Honor Guru masih kurang
 8. Keterampilan dan teknis mengajar dengan metode baru masih kurang
 9. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi belum ada
 10. Belum terbentuknya PKBM (Kejar Paket)
 11. Masih ada anak putus sekolah
 12. Unit Kesehatan belum terbentuk
- c. Bidang Ekonomi
1. Belum ada pengembangan potensi ekonomi desa
 2. Belum adanya Pasar Desa
 3. Lembaga Ekonomi (UED SP) belum memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan desa
 4. Belum terlaksananya pelatihan-pelatihan di bidang peningkatan manajemen usaha dan kewirausahaan
 5. Penggalan PAD Desa belum dioptimal
 6. Rendahnya harga komoditas karet yang sejak 3 tahun terakhir mengalami penurunan nyata mengakibatkan pendapatan petani menurun drastis.
 7. Rendahnya harga komoditas kelapa sawit sejak 3 bulan terakhir mengalami penurunan nyata mengakibatkan pendapatan petani menurun drastis.
 8. Lembaga ekonomi desa UED-SP belum menjadi BUMDES
- d. Bidang Sosial Budaya
1. Arus informasi dan globalisasi tidak terbendung yang menyebabkan tergerusnya kearifan lokal
 2. Peran lembaga adat dan pimpinan adat kurang optimal
 3. Belum optimal pengembangan budaya lokal desa
- e. Bidang Pemerintahan
1. Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan belum terampil
 2. Pelaku-pelaku pembangunan masih kurang paham akan tugas dan fungsi
 3. Pelayanan masyarakat kurang optimal
 4. Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik
 5. Administrasi Desa yang kurang dimanfaatkan secara optimal
 6. Insentif yang diterima oleh Aparatur desa dan kelembagaan desa belum memadai
 7. Masih Kurangnya perhatian Pemerintah dan Pemerintah dalam hal pembinaan kepada Pemerintah Desa
- f. Bidang Kesehatan
1. Kesadaran akan kesehatan keluarga yakni sanitasi lingkungan masih lemah
 2. Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi belum memadai
 3. Penggunaan Pustu belum optimal karena peralatan kurang lengkap

3.2 Jenis UMKM di Desa Salo

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, di Desa Salo terdapat beberapa jenis UMKM antara lain :

1. Perkebunan Sayur

Warga desa biasanya memiliki lahan yang cukup luas. Ketersediaan lahan ini bisa dimanfaatkan untuk mendirikan perkebunan sayur. Bisnis jual beli sayur-mayur tentu bisa mendatangkan keuntungan yang besar. Bisnis ini bisa dimulai dengan skala kecil. Mulai dari menanam beberapa jenis sayuran lalu hasil panennya di jual ke warga sekitar. Jika dikelola dengan benar, bisnis ini bisa berkembang besar.

2. Budidaya ikan

Jenis usaha yang satu ini telah banyak dipraktikkan langsung oleh para warga desa. Budidaya ikan saat ini juga semakin mudah dengan tersedianya fasilitas berupa kolam terpal yang ekonomis dan praktis. Contohnya adalah budidaya ikan lele.

3. Kerajinan Tangan

Bisnis jenis ini sangat menjanjikan karena peminat produk kerajinan tangan sekarang sudah bertambah banyak. Jenis produk yang bisa dihasilkan pun sangat beragam, mulai dari produk rajut, anyaman, dan masih banyak lagi lainnya.

4. Kuliner

Bisnis jenis ini sangat cukup banyak ditemukan di desa, karena usaha jenis ini paling banyak dijalankan oleh warga desa, baik berupa makanan ringan maupun makanan sehari-hari.

5. Usaha jahit

Bisnis jenis ini dijalankan oleh beberapa warga, karena kebutuhan terhadap pakaian merupakan kebutuhan pokok warga yang harus terpenuhi.

6. Usaha ternak

Usaha ternak yang dijalankan sebagian berupa ternak unggas ayam, karena lebih mudah dalam perolehan pakan ternak dan pemeliharaannya.

3.3. Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan UMKM

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dan warga di Desa Salo, Pemerintah Desa telah melaksanakan beberapa peran dalam memajukan UMKM di Desa Salo sebagai berikut :

1. Sebagai Fasilitator

Pemerintah Desa membantu UMKM dalam memberikan Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam menjalankan usahanya. Diantaranya adalah pelatihan pembuatan makanan dan kerajinan tangan kepada warga desa. Namun terbatasnya anggaran yang tersedia jumlah pelatihan yang dilakukan masih terbatas. Selain memberikan pelatihan, pemerintah juga memberikan jalan kepada UMKM yang membutuhkan tambahan modal melalui Koperasi yang dijalankan sebagai salah satu BUMDes yang ada di desa Salo.

2. Sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah desa memiliki peran menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif serta membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam melaksanakan fungsi regulator, pemerintah desa membagi wewenang pembuatan kebijakan terhadap UMKM di desa nya menjadi dua yakni wewenang pemerintah desa dengan pemerintah ditingkat RW kemudian akan diturunkan lagi kepada tingkat RT.

3. Sebagai Katalisator

Katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi fast moving enterprise.

Adapun langkah langkah yang ditempuh pemerintah desa untuk menjalankan perannya sebagai katalisator adalah pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM (perlindungan hak kekayaan intelektual) dan permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir. Pemerintah juga diwajibkan untuk menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang siap bermitra; mengembangkan proyek percontohan Kemitraan; memfasilitasi dukungan kebijakan; dan melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian tentang Peran Pemerintah Desa dalam memotivasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah ada menjalankan perannya tetapi semuanya belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak semua dari pelaku UMKM yang dapat mengikuti peran tersebut. Dikarenakan peran tersebut sebagian tidak bersifat umum. Contohnya pemerintah desa sebagai fasilitator yaitu pemerintah desa menyediakan fasilitas berupa mesin jahit dan pelatihan menjahit, penyediaan mesin jahit dan pelatihan tersebut hanya dapat di rasakan oleh UMKM yang mempunyai usaha jahit saja. Sementara untuk pelatihan ataupun sosialisasi bagi pelaku UMKM yang lainnya itu belum ada. Dan juga dalam mendata para pelaku UMKM untuk mendapatkan modal bantuan itu belum berjalan dengan baik dikarenakan tidak semua dari pelaku UMKM mendapatkan bantuan modal tersebut. Berbeda dengan pinjaman modal usaha, itu baru semua dari pelaku UMKM yang ikut merasakan atau mendapatkannya. Dari semua jenis peran yang sudah dilakukan pemerintah desa yang dapat dirasakan manfaatnya oleh semua para pelaku UMKM berupa : Pendataan dan permodalan, simpan pinjam, gas elpiji dan pembuatan surat izin usaha.

Pemerintah desa sebagai motivator juga dikatakan belum berjalan dengan baik dikarenakan yang mendapatkan motivasi tersebut hanya para UMKM bidang menjahit dan Gapoktan (gabungan kelompok tani saja). Sementara untuk pelaku UMKM yang lainnya tidak ada.

Pemerintah desa sebagai katalisator dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dikarenakan dalam proses kerjasama tersebut berjalan lancar dan tidak terdapat kendala. Jadi di antara peran pemerintah desa sebagai fasilitator, motivator dan katalisaor yang sudah berjalan dengan baik itu hanya katalisator, Dan diharapkan kepada pemerintah desa untuk lebih meningkatkan lagi perannya. jika ingin mengadakan pelatihan itu lebih baik untuk semua jenis pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Agar semua dari pelaku UMKM tersebut sama-sama ikut serta dan berpartisipasi dan semua dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah itu merasakan dampak dan manfaatnya.

REFERENCES

- Berry, D. (2009). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Raja Grafindo Persada.
- Bowono, I. R. (2019). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. PT. Grasindo.
- Nana Syaodih, S. (2011). *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H. (2011a). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Nurcholis, H. (2011b). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Nurcholis, H. (2011c). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Nurmansyah, Alhemp, S. (2021a). *Kewirausahaan & UMKM*. Unilak Press.
- Nurmansyah, Alhemp, S. (2021b). *Kewirausahaan & UMKM*. Unilak Press.
- Partomo. (2004). *Menjadi Wirausaha yang Handal, Konsep dan Strategi*. Gunung Agung.
- Raharjo, M. M. (n.d.). *Pokok-pokok dan Sistem Pemerintahan Desa*. Rajawali Pers.

- Raharjo, M. M. (2021a). *Pokok-pokok Dan Sistem Pemerintahan Desa*. Rajawali Pers.
- Raharjo, M. M. (2021b). *Pokok-pokok Dan Sistem Pemerintahan Desa*. Rajawali Pers.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustakaraya.
- Rivai, V. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soehartono. (2008). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Soejono, S. (2002a). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta Press.
- Soejono, S. (2002b). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta Press.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi Baru). Rajawali Pers.
- Sondang, P. siagian. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Tjipto, S. (2008). *Sosiologi*. BP-FKIP UMS.
- Tjokroamidjojo, B. (2000). *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Rajawali.
- Uno, B. H. (2008). *Teori Motivasi Dan Pengukurannya*. PT. Bumi Aksara.
- Diva, G. (2009). Pengembangan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta. *Bakrie School of Management*.
- Fillmore H, S. (2017). *Human Resource Management*.
- Hubermen, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Jafissa Tomi, B. S. (2020). Peranan Pemerintahan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Laut Dendang. *Jurnal Republik Reform Undhar Medan*, 11.
- Kencana, Hilya, R. (2019). Peran Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi Lokal Pada Industri Bata Bata (Studi kasus Desa Ujanmas Baru Kec. Ujanmas Kabupaten Muara Enim). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Global*, 04, 76.
- Narimawati. (2008). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*.
- Ningsih, M. U. (2020). *No Title*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- REDAKSI, T. (2022). *Pengertian UMKM dan Jenis-Jenis UMKM*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220217144409-72-316193/catat-ini-dia-pengertian-dan-jenis-jenis-umkm>
- Sayuti, U. (2012). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Syariah.
- Stefanovic. (n.d.). Significant and Development Problems OF SME's in Contemporary Market Economy. *Serbian Journal of Management*.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*.
- Yulianto, K. (2012). Tentang Teori Motivasi. *Jurnal Inovasi*, 9.